



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

LAPORAN JENIS PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL

SEMESTER I TAHUN 2025

INSPEKTORAT BMKG

Jl. Angkasa I No. 02, Kemayoran, Jakarta 10610
Telp. (021) 424 6321 Fax. (021) 424 6703 P.O Box 3540 Jkt
Website: <http://www.bmkg.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) Inspektorat BMKG Semester I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan ILHP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaan pengawasan intern yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan BMKG.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Jakarta, September 2025

Inspektur BMKG



Nasrul Wathon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	4
BAB I. INFORMASI UMUM	5
A. Dasar Hukum	5
B. Struktur Organisasi.....	5
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	5
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	5
BAB II. INFORMASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL BMKG	6
A. Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP	6
B. Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP	6
C. Status Tindak Lanjut Temuan	7
BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	7
A. Simpulan	7
B. Hambatan.....	8
C. Rekomendasi.....	8
LAMPIRAN	9

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Pada Semester I Tahun 2025, Inspektorat BMKG telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa **Audit Operasional dan Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)** di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan **41 kasus temuan** dengan distribusi terbesar pada aspek **ketidakpatuhan terhadap peraturan**.

Dari 41 kasus tersebut, APIP BMKG mengeluarkan **79 rekomendasi perbaikan**, dengan tiga kategori rekomendasi terbanyak yaitu:

1. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan (31,6%).
2. Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat (30,4%).
3. Rekomendasi lain-lain (30,4%).

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan masih menemukan kelemahan signifikan pada aspek kepatuhan regulasi, pengendalian intern, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang lebih konsisten dan sistematis agar temuan tidak berulang pada periode berikutnya.

BAB I. INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
4. Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BMKG Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat BMKG dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Sub Bagian Tata Usaha, dengan fungsi utama melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

1. Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai hasil pengawasan Inspektorat BMKG.
2. Menyajikan informasi perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Menjadi dasar rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

1. Program Pengawasan Semester I 2025 untuk kegiatan Audit adalah 35 UPT.
2. Realisasi sampai dengan akhir Juni 2025 adalah 32 UPT (**91%**).

BAB II. INFORMASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL BMKG

A. Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP

Berikut disajikan hasil temuan Audit Operasional & Audit PBJ yang dilaksanakan pada periode Januari 2025 hingga Juni 2025 (Semester I) pada unit pelaksana teknis (UPT) BMKG yang tersebar di wilayah Indonesia:

NO.	SUB KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH KEJADIAN	%
		SEMESTER I 2025	
1.	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	30	73,2
2.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	6	14,6
3.	Temuan 3E	5	12,2
Jumlah		41	100

Sumber: Inspektorat BMKG

Hasil dari kegiatan Audit Operasional & Audit PBJ diketahui temuan yang paling dominan terjadi pada periode Semester I 2025 adalah pada sub kelompok Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan dengan jumlah kejadian sebanyak **30** temuan atau **73,2%**, disusul temuan pada sub kelompok Kelemahan Sistem Pengendalian Internal sebanyak **6** temuan atau **14,6%**, dan terakhir adalah pada sub kelompok Temuan Tidak Hemat, Tidak Ekonomis dan Tidak Efektif (3E) sebanyak **5** temuan atau **12,2%** dari keseluruhan temuan sebanyak **41** kasus.

B. Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP

Dari hasil temuan audit operasional yang telah dilaksanakan APIP pada periode Semester I Tahun 2025 tersebut, diberikan rekomendasi yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk perbaikan kinerja UPT yang dinilai kurang. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat;
2. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan;
3. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
4. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan;
5. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi;
6. Lain-lain;

Dari total 41 kasus temuan pada periode Semester I Tahun 2025 telah diberikan sebanyak 79 rekomendasi perbaikan. Pada tiap jenis temuan, bisa diberi beberapa rekomendasi sekaligus. Berikut disajikan jumlah rekomendasi yang diberikan berdasarkan jenis temuannya:

NO.	SUB KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI
		SEMESTER I 2025
1.	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	63
2.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	9
3.	Temuan 3E	7
Jumlah		79

Sumber: Inspektorat BMKG

Dari 79 rekomendasi pada Semester I Tahun 2025 di atas, **tiga jenis rekomendasi paling dominan** yang diberikan oleh APIP adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sebanyak 25 rekomendasi (31,6%), disusul rekomendasi penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat sebanyak 24 rekomendasi (30,4%), dan rekomendasi lain-lain sebanyak 24 rekomendasi (30,4%).

C. Status Tindak Lanjut Temuan

Dari 41 Temuan pada Semester I Tahun 2025 di atas, diketahui bahwa 38 temuan belum ditindaklanjuti dan 3 temuan dalam proses tindak lanjut.

BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pada Semester I Tahun 2025, Inspektorat BMKG melalui kegiatan Audit Operasional dan Audit PBJ menemukan 41 kasus temuan, dengan proporsi terbesar berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan (73,2%).
2. Temuan berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian intern (14,6%) dan temuan 3E (tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif) sebanyak 12,2%.
3. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, telah diberikan 79 rekomendasi, dimana rekomendasi terbanyak berupa perubahan atau perbaikan prosedur,

peraturan, dan kebijakan (31,6%), serta rekomendasi penyetoran ke kas negara/daerah dan lain-lain.

4. Pola temuan menunjukkan bahwa aspek kepatuhan regulasi dan penguatan sistem pengendalian intern masih menjadi isu utama yang perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi temuan berulang.

B. Hambatan

1. **Kepatuhan unit kerja masih rendah** dalam mengikuti peraturan dan standar biaya, terbukti dengan dominasi temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Temuan berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian intern (14,6%) dan temuan 3E (tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif) sebanyak 12,2%.
2. **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** pada sebagian UPT belum berjalan efektif, khususnya dalam pencatatan, pelaporan, dan pengendalian biaya.

C. Rekomendasi

1. Penguatan kepatuhan regulasi melalui sosialisasi dan penegakan aturan, khususnya terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, dan prosedur PBJ.
2. Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap UPT, termasuk monitoring dan supervisi rutin oleh pimpinan unit kerja.

LAMPIRAN

Rekap Jenis Pelanggaran dalam Pengawasan Internal BMKG Semester I Tahun 2025

